

**PRO-KONTRA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN
SEKSUAL DI KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Bidang ilmu pemerintahan



Oleh:

ANNISA TUROBI'AH

41183506190035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang telah dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Annisa Turobi'ah

NPM : 41183506190035

Tanda Tangan :



Pada Tanggal : 23 November 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Pro-Kontra Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10
Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku
Penyimpangan Seksual di Kota Bogor

Penyusun : Annisa Turobi'ah

NPM : 41183506190035

Bekasi, 23 November 2023

Menyetujui :

Pembimbing,



Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Muhammad Fadil, S.IP., M.Si,

LEMBAR PENGESAHAN



Pro-Kontra Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di
Kota Bogor

Dipersiapkan dan Dususun Oleh :

Annisa Turobi'ah

41183506190035

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 23 November 2023

Dan telah dinyatakan Lulus / Disahkan :

di Universitas Islam "45" Bekasi

Pada Tanggal : 23 November 2023

Dewan Penguji :

Ketua : Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.


.....

Sekretaris : Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.


.....

Anggota : 1. Dr. Fadhilah, Dra., M.Phil.


.....

2. Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP.


.....

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulisan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah “Pro - Kontra Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kota Bogor” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk melanjutkan pada penyusunan tugas akhir yaitu skripsi pada program studi Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari pada penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini banyak diperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung baik berupa tenaga maupun pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu perkenankanlah saya untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada:

1. Kedua Orangtua dan keluarga yang telah memberikan support dan doa terbaik agar dapat menggapai cita-cita
2. Susi Dian Rahayu, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing
3. Drs. Yanto Supriyatno., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi.
4. Muhammad Fadil., S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi.
6. Kepada Regita Ardhya yang telah memberikan support dan doa terbaik untuk berkembang menggapai cita-cita
7. Rekan-Rekan Mahasiswa Fisip Unisma Bekasi Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019.

Skripsi ini telah penulis susun dengan semaksimal mungkin dan dapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi. Tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penulisan ini tidak lain berkat bantuan dorongan serta bimbingan sehingga kendala yang penulis hadapi teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih belum sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga skripsi ini dapat menjadi acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Bekasi, 23 November 2023

Yang Menyatakan,



Annisa Turobi'ah

ABSTRAK

Kota Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai jumlah kasus HIV AIDS yang tinggi di Indonesia. Hingga tahun 2022, terdapat 111 kasus HIV AIDS, salah satunya disebabkan oleh penyimpangan seksual. Di Kota Bogor, dari tahun 2018-2022 terdapat 790 kasus penyimpangan seksual. Untuk mencegah semakin meluasnya praktik penyimpangan seksual, Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual di Kota Bogor. Namun peraturan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menganggap peraturan tersebut mengandung unsur pelanggaran HAM yang memperparah kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Bogor. Sementara itu, masyarakat yang pro menganggap aturan ini sebagai upaya pencegahan penyimpangan seksual yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan teori ROCCIPI oleh Ann Seidman, Robbert B. Seidman dan Nalin Abeysekere dengan menggunakan 7 kategori yang meliputi Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam penyusunan peraturan ini, sebagian besar ormas yang menolak peraturan tersebut adalah ormas di luar Kota Bogor yang sebagian besar merupakan ormas berskala nasional hingga internasional. Meski mayoritas masyarakat Kota Bogor mendukung peraturan P4S, namun dalam proses penyusunan peraturan tersebut tidak ada penolakan dari masyarakat Kota Bogor.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pro-Kontra, Penyimpangan Seksual

ABSTRACT

Bogor City is one of the regions in Indonesia that has a high number of HIV AIDS cases in Indonesia. Until 2022, there were 111 cases of HIV AIDS, one of which was caused by sexual deviance. In Bogor City, from 2018-2022 there were 790 cases of sexual deviance. To prevent the practice of sexual deviance from becoming more widespread, the Bogor City Government together with the Bogor City DPRD drafted Regional Regulation No. 10 of 2021 concerning Prevention and Countermeasures of Sexual Deviance in Bogor City. However, the regulation has drawn pros and cons among the public. Considers that this regulation contains elements of human rights violations that exacerbate violence and discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender groups in Bogor City. Meanwhile, the pro community considers this regulation as an effort to prevent sexual deviations from the Bogor city government. This research uses ROCCUPI theory by Ann Seidman, Robbert B. Seidman and Nalin Abeyserkere by using 7 categories which include Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology. The results of this study are In the preparation of this regulation, most of the mass organizations that reject the regulation are mass organizations outside the city of Bogor, most of which are mass organizations on a national to international scale. While the majority of the people of Bogor city support the P4S regulation, during the process of drafting the regulation there was no rejection from the people of Bogor city.

Keyword : Regional Regulation, Pos-Cons, Sexual Deviant

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
RIWAYAT HIDUP	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Signifikansi Penelitian	11
1.4.1 Signifikansni Akademis	11
1.4.2 Signifikansi Praktis	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORI	16
2.1 Perspektif Teoritis.....	16
2.1.1 Kebijakan Publik.....	16
2.1.2 ROCCIPI (<i>rule, oppoturnity, capacity, communication, interest, process, and ideology</i>)	22
2.1.3 Pemerintah Daerah.....	27
2.1.4 Peraturan Daerah.....	30
2.1.5 Penyimpangan Seksual	34

2.1.6	Pro Dan Kontra LGBT	36
2.2	Kerangka Pemikiran	37
2.3	Definisi Operasional	40
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1	Paradigma Penelitian	42
3.1.1	Paradigma Konstruktivisme	42
3.2	Metode Penelitian Kualitatif	42
3.3	Desain Penelitian	42
3.4	Sumber dan Teknik Perolehan Data	43
3.4.1	Teknik Perolehan Data	43
3.4.2	Teknik Perekrutan Informan	43
3.5	Teknik Analisis Data	44
3.6	Goodness Dan Quality Criteria Penelitian (Uji Keabsahan Data)	44
3.6.1	Trustworthiness	44
3.6.2	Otentisitas	45
3.7	Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.8	Jadwal Penelitian	45
3.9	Keterbatasan Penelitian	46
BAB IV	PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum	47
4.2	Proses Penyusunan Perda Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual	52
4.3	Pro Kontra Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual	58
4.3.1	<i>Rule</i> (Peraturan)	60
4.3.2	Analisis <i>Rule</i> (Peraturan)	62
4.3.3	<i>Opportunity</i> (Peluang)	67
4.3.4	Analisis <i>Oppoturnity</i> (Peluang)	70
4.3.5	<i>Capacity</i> (Kemampuan)	76
4.3.6	Analisis <i>Capacity</i> (Kemampuan)	78
4.3.7	<i>Communication</i> (Komunikasi)	83

4.3.8 Analisis <i>Communication</i> (Komunikasi).....	85
4.3.9 <i>Interest</i> (kepentingan).....	90
4.3.10 Analisis <i>Interest</i> (Kepentingan).....	92
4.3.11 <i>Process</i> (Proses).....	96
4.3.12 Analisis <i>process</i> (proses).....	99
4.3.12 <i>Ideology</i> (Ideologi).....	103
4.3.13 Analisis <i>Ideology</i> (Ideologi).....	105
4.4 Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Menghadapi Pro Kontra Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.....	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka LGBT di Kota Bogor	3
Tabel 1.2 Kasus HIV AIDS di Kota Bogor	4
Tabel 1.3 Kasus HIV Di Kota Bogor	5
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Daftar Informan	44
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2022	48
Tabel 4.2 Indikator Rule (Peraturan).....	62
Tabel 4.3 Indikator Oppoturnity (Kesempatan)	70
Tabel 4.4 Indikator <i>Capacity</i> (Kemampuan)	78
Tabel 4.5 Indikator Comunication (Komunikasi)	85
Tabel 4.6 Indikator Interest (Kepentingan).....	92
Tabel 4.7 Indikator Process (Proses)	99
Tabel 4.8 Indikator Ideology (Ideologi).....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4. 1 Peta Kota Bogor	47

HASIL CEK TURNITIN

Pro Kontra Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penangg

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ylbhi.or.id Internet Source	2%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
3	pdffox.com Internet Source	1%
4	erepo.unud.ac.id Internet Source	1%
5	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%